

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 :

Inflasi Bulanan (Month-to-Month)

Pada April 2025, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) di Kabupaten Bondowoso tercatat sebesar **1,17 persen**-angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,93 persen, namun masih berada dalam kisaran yang umum untuk periode pasca-Ramadan dan Idul Fitri. Inflasi bulanan nasional pada periode yang sama juga tercatat 1,17 persen, sehingga Bondowoso mengikuti tren nasional.

Inflasi Tahunan (Year-on-Year)

Meskipun data inflasi tahunan (y-on-y) Kabupaten Bondowoso secara spesifik belum tersedia di hasil pencarian, inflasi tahunan Provinsi Jawa Timur pada April 2025 tercatat sebesar **1,35 persen**. Inflasi tahunan di Bondowoso umumnya berkisar pada angka tersebut, dengan variasi kecil tergantung pada dinamika harga lokal.

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

- **Komoditas Penyumbang Inflasi:** Di Jawa Timur secara umum, kenaikan harga terbesar pada April 2025 terjadi pada tarif listrik (inflasi m-to-m hingga 33,76%), emas perhiasan (12,63%), angkutan udara (6,46%), bawang merah (7,18%), dan kelapa (24,86%). Kenaikan ini juga berdampak di Bondowoso.
- **Komoditas Penahan Inflasi:** Cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah mengalami deflasi bulanan dan mampu menahan laju inflasi di Jawa Timur, sehingga juga berpengaruh positif di Bondowoso.

Risiko Inflasi ke Depan

- **Kenaikan Harga Energi dan Listrik:** Berakhirnya program diskon listrik pemerintah pada Februari 2025 berkontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi di seluruh Jawa Timur, termasuk Bondowoso.
- **Volatilitas Harga Pangan:** Harga komoditas seperti bawang merah dan kelapa masih rentan terhadap fluktuasi, terutama karena faktor cuaca, distribusi, dan permintaan musiman.
- **Permintaan Emas dan Barang Mewah:** Lonjakan harga emas perhiasan dapat memicu inflasi tambahan, terutama menjelang hari besar dan musim pernikahan.

Distribusi dan Pasokan: Gangguan distribusi atau pasokan pangan dapat memperburuk kenaikan harga, terutama di daerah yang jauh dari sentra produksi.

Upaya Pengendalian Inflasi

Pemerintah daerah dan TPID Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai upaya, termasuk:

- **Program Lumbung Pangan EPIK Mobile:** Program ini memanfaatkan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, menysasar wilayah yang mengalami gejolak harga tinggi, termasuk Bondowoso. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Jatim, Bank Indonesia, dan BUMD setempat.
- **Pengawasan Harga:** Intensifikasi pengawasan harga di pasar-pasar tradisional dan modern, serta distribusi bahan pokok yang merata.
- **Sinergi dengan Petani:** Implementasi kebijakan korporasi petani dan kelembagaan Koperasi Multi Pihak (KMP) untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

Ringkasan :

Inflasi di Kabupaten Bondowoso pada April 2025 sejalan dengan tren nasional dan provinsi, dengan tekanan utama berasal dari kenaikan harga listrik, emas, dan beberapa komoditas pangan. Risiko ke depan masih didominasi oleh volatilitas harga energi dan pangan, serta potensi gangguan distribusi. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui program EPIK Mobile dan pengawasan harga yang ketat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

1. Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Inflasi

- **Kenaikan Harga Bahan Pokok:** Fluktuasi harga komoditas utama seperti beras dan cabai dapat memicu inflasi, meskipun di Bondowoso dampaknya relatif terbatas karena mayoritas penduduk adalah petani padi dan cabai.
- **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan harga energi strategis, subsidi, dan tarif listrik sangat memengaruhi inflasi lokal.
-

Dinamika Ekonomi Global dan Nasional: Ketergantungan daerah pada perekonomian nasional dan global membuat Bondowoso rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal, termasuk pandemi dan volatilitas harga di tingkat global.

2. Ketergantungan pada Komoditas Tertentu

- **Ketergantungan pada Satu Komoditas:** Tingkat inflasi di suatu daerah dapat meningkat tajam jika terjadi gejolak pada komoditas tertentu yang menjadi andalan atau kebutuhan utama daerah tersebut.

3. Daya Saing dan Struktur Ekonomi Daerah

- **Daya Saing Daerah yang Rendah:** Daya saing ekonomi Bondowoso masih rendah, ditandai dengan tingginya pengangguran (4,13% pada 2020) dan kemiskinan (14,17%), serta rendahnya kualitas SDM dan infrastruktur.
- **Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat:** Struktur APBD yang didominasi dana perimbangan dan bantuan pusat membatasi kapasitas fiskal daerah dalam mengendalikan inflasi.

4. Infrastruktur dan Distribusi

- **Kondisi Infrastruktur yang Belum Memadai:** Hanya sekitar 65% infrastruktur perekonomian (seperti jalan) yang memadai, sehingga distribusi barang dan jasa terhambat dan berpotensi menaikkan biaya logistik serta harga barang pokok.
- **Distribusi yang Tidak Merata:** Gangguan distribusi dapat menyebabkan disparitas harga antar wilayah dan memperparah inflasi lokal, terutama di daerah terpencil.

5. Tantangan Pengendalian Inflasi

- **Koordinasi dan Sinergi:** Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, instansi, dan pelaku ekonomi lokal untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat.
- **Pengawasan dan Monitoring Harga:** Pengawasan harga di pasar tradisional dan modern, serta ketersediaan stok di gudang Bulog perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.
- **Komunikasi Efektif:** Komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha diperlukan untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang terkendali.

◦

Ringkasan

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso meliputi fluktuasi harga bahan pokok, ketergantungan pada komoditas tertentu, rendahnya daya saing ekonomi, infrastruktur yang belum memadai, serta kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Sinergi, pengawasan harga, dan komunikasi efektif menjadi kunci dalam upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

1. Strategi 4K

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu:

- **Ketersediaan Pasokan:** Memastikan stok bahan pokok cukup, termasuk melalui operasi pasar dan monitoring ketersediaan di gudang Bulog.
- **Keterjangkauan Harga:** Melakukan operasi pasar dan pengawasan harga agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
- **Kelancaran Distribusi:** Memperkuat distribusi perdagangan dan logistik, termasuk melalui program seperti Lumbung Pangan EPIK Mobile yang menjangkau daerah rawan gejolak harga.
- **Komunikasi Efektif:** Melakukan komunikasi publik dan edukasi terkait kenaikan harga serta upaya pengendalian inflasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

2. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

TPID Kabupaten Bondowoso aktif dalam:

- **Stabilisasi Harga:** Melakukan operasi pasar dan pemantauan harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan daging ayam ras.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Rutin melakukan rapat koordinasi, evaluasi, dan pelaporan terkait perkembangan harga dan ketersediaan stok, termasuk partisipasi dalam rapat koordinasi nasional dan provinsi.
- **Pengawasan Distribusi:** Memperkuat pengawasan terhadap distribusi operasi pasar

agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pedagang besar.

3. Program dan Inovasi

- **Lumbung Pangan EPIK Mobile:** Program ini memanfaatkan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, menysasar wilayah yang mengalami gejolak harga tinggi. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Jatim, Bank Indonesia, dan BUMD setempat.
- **Program Tatik Cekatan:** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso juga meluncurkan program Tatik Cekatan untuk memperkuat sistem distribusi dan ketersediaan pangan.

4. Koordinasi dan Sinergi

- **Koordinasi dengan Stakeholder:** Pemkab Bondowoso secara rutin berkoordinasi dengan instansi terkait, pelaku ekonomi, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap fluktuasi harga.
- **Penguatan Sektor Pertanian:** Upaya pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas lahan, pengembangan teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani lokal dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi dari sisi pasokan.

5. Pengawasan dan Pelaporan

- **Satgas Pangan:** Mengaktifkan Satgas Pangan yang bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas secara rutin kepada pemerintah daerah.
- **Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan:** Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan inflasi dan harga di daerah.

Ringkasan

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso dijalankan secara komprehensif melalui strategi 4K, peran aktif TPID, program inovatif seperti Lumbung Pangan EPIK Mobile, serta koordinasi dan pengawasan yang intensif. Upaya ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, meski tetap memerlukan perbaikan terutama dalam hal ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

1. Efektivitas Kebijakan TPID

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Bondowoso dinilai efektif dalam stabilisasi harga komoditas pangan, terutama beras, cabai, dan daging ayam ras. Efektivitas ini diukur dari empat indikator utama:

- **Pemahaman Program:** Pemangku kepentingan memahami dengan baik tujuan dan pelaksanaan program.
- **Ketepatan Waktu:** Intervensi dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan.
- **Pencapaian Tujuan:** Harga komoditas pangan menjadi lebih stabil setelah intervensi TPID.
- **Perubahan Nyata:** Terjadi penurunan fluktuasi harga yang signifikan dibandingkan sebelum intervensi.

Namun, masih terdapat kendala pada indikator **ketepatan sasaran**, di mana manfaat operasi pasar kadang tidak optimal karena dimanfaatkan oleh pedagang besar, bukan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses distribusi.

2. Proses Evaluasi dan Monitoring

Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring melalui rapat koordinasi, baik secara daring maupun luring, yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau kenaikan harga dan ketersediaan komoditas, serta merespons secara cepat jika terjadi gejolak harga. Satgas Pangan juga aktif melaporkan harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala kepada pemerintah daerah.

3. Komunikasi dan Partisipasi Publik

Komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Pemerintah daerah secara aktif menginformasikan kenaikan harga dan

langkah-langkah yang diambil, sehingga masyarakat memahami situasi dan kebijakan yang dijalankan.

4. Program Inovatif

Program seperti Lumbung Pangan EPIK Mobile telah menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Program ini berhasil menjangkau wilayah yang rawan gejolak harga dan memperkuat distribusi bahan pokok di daerah.

5. Tantangan dan Rekomendasi

- **Kendala:** Masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan, serta potensi penyalahgunaan oleh pedagang besar.
- **Rekomendasi:** Diperlukan penguatan pengawasan distribusi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan, serta koordinasi yang lebih erat antar-stakeholder untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi lebih optimal dan tepat sasaran.

Ringkasan

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso dinilai efektif secara umum, khususnya dalam stabilisasi harga komoditas pangan dan komunikasi publik. Namun, masih diperlukan perbaikan pada aspek ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso, berikut beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Pengawasan Distribusi dan Ketepatan Sasaran

- **Meningkatkan pengawasan operasi pasar** agar bantuan dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat, bukan dimanfaatkan oleh pedagang besar.
- **Melibatkan masyarakat dan komunitas lokal** dalam proses pemantauan dan distribusi bahan pokok untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

2. Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Antar-Stakeholder

- **Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, Bulog, dan pelaku ekonomi lokal** untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap gejolak harga dan inflasi.
- **Mengembangkan forum komunikasi rutin** untuk membahas faktor-faktor penyebab inflasi dan merumuskan solusi bersama.

3. Inovasi Program dan Intervensi Pasar

- **Memperluas program pasar murah dan subsidi penjualan** ke wilayah-wilayah yang rawan gejolak harga, termasuk melalui inovasi seperti Lumbung Pangan EPIK Mobile.
- **Mengembangkan BUMD dan Trading House lokal** untuk stabilisasi harga komoditas strategis, seperti kopi dan pangan lainnya, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan dan pengendalian inflasi dari sisi pasokan.

4. Penguatan Infrastruktur dan Logistik

- **Memperbaiki infrastruktur jalan dan logistik** untuk memperlancar distribusi bahan pokok ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- **Mengoptimalkan peran masyarakat tani** dalam produksi dan distribusi komoditas lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

5. Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Analisis Data

- **Mengadopsi sistem monitoring inflasi berbasis teknologi** seperti JAIM Report untuk memantau harga secara real time dan melakukan prediksi inflasi secara dini.

Melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala berdasarkan data dan analisis yang akurat.

6. Komunikasi dan Edukasi Publik

- **Meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat** mengenai kebijakan pengendalian inflasi dan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
- **Menyampaikan informasi secara transparan** terkait perkembangan harga dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah.

Ringkasan

Rekomendasi utama mencakup penguatan pengawasan distribusi, optimalisasi koordinasi, inovasi program, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas monitoring, serta komunikasi dan edukasi publik. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso secara berkelanjutan.